

## **Analisis Peran penting Indonesia dalam kerja sama ekonomi politik maritim**

**Alingka Natasya Azhar**

*International Relations Department, Faculty of Social and Political Science,  
Universitas Satya Negara Indonesia*

Email: [alingka02@gmail.com](mailto:alingka02@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Sebagai negara maritim Indonesia memiliki peluang terhadap ekonomi dan politik nya sebagai pendukung perkembangan negara Indonesia, Jurnal ini membahas peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi politik maritim selama era pemerintahan Jokowi. Melalui analisis kebijakan, perjanjian internasional, dan implementasi program, penelitian ini mengungkap dampak serta tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya memperkuat kerja sama maritim di tingkat ekonomi dan politik. Dengan fokus pada inisiatif Jokowi, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif tentang peran Indonesia dalam konteks kerja sama maritim di era pemerintahannya. Dalam penelitian ini, isu ekonomi politik maritim Indonesia merupakan sangatlah penting bagi para calon presiden untuk memandang kebijakannya. Maka penting untuk melakukan ataupun melihat strategi yang melihat bahwasannya maritim juga merupakan kepentingan mendukung perkembangan Indonesia. Dengan melakukan kerjasama antar negara merupakan suatu upaya yang menjadi landasan penting yang harus dilakukan oleh Indonesia.

**Kata kunci :** Indonesia, Jokowi, kerjasama ekonomi politik, poros maritim, strategi.

### **ABSTRACT**

*As a maritime country, Indonesia has opportunities for its economy and politics to support the development of the Indonesian state. This journal discusses Indonesia's role in maritime political economic cooperation during the Jokowi government era. Through policy analysis, international agreements, and program implementation, this research reveals the impacts and challenges faced by Indonesia in efforts to strengthen maritime cooperation at the economic and political levels. By focusing on Jokowi's initiatives, this research presents a comprehensive picture of Indonesia's role in the context of maritime cooperation in his era. In this research, the issue of Indonesia's maritime political economy is very important for presidential candidates to view their policies. So it is important to carry out or look at strategies that sees the maritime is also an interested in supporting Indonesia's development. Collaborating between countries is an effort that is an important foundation that must be carried out by Indonesia.*

*Keywords: Indonesia, Jokowi, political economic cooperation, maritime axis, strategy.*

## PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan negara kepulauan terluas di dunia, terdiri dari lebih dari 17.504 pulau, di mana 13.466 di antaranya sudah memiliki nama. Sebanyak 92 pulau terluar telah diakui di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai titik awal dari wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas. Dengan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis di antara Benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Hindia dan Pasifik. Wilayah daratannya mencakup sekitar 2.012.402 km<sup>2</sup> sementara wilayah lautnya mencapai sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (75,7%), dengan 2.012.392 km<sup>2</sup> sebagai Perairan Pedalaman, 0,3 juta km<sup>2</sup> sebagai Laut Teritorial, dan 2,7 juta km<sup>2</sup> sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dengan Kehadiran laut yang luas dan garis pantai yang panjang menjadikan sektor maritim dan kelautan sangat penting bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi dan lingkungan, maupun aspek sosial-budaya, hukum, dan keamanan (Nikawanti, 2021).

Indonesia yang juga merupakan (Placeholder3) negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, berada di persilangan dua samudra dan dua benua. Oleh karena itu, pentingnya fokus pada pengembangan sektor kemaritiman menjadi suatu keharusan. Sejak zaman dahulu, peran penting sektor maritim bagi Indonesia telah diakui, bahkan sebelum terbentuknya Republik Indonesia, ketika wilayah ini terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil dengan kepentingan masing-masing. Indonesia memiliki keunggulan di bidang maritim yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ini menjadi kekuatan yang mampu membawa Indonesia melampaui status negara sedang berkembang menuju negara maju. Potensi kekayaan alam laut Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan pangan bagi masyarakatnya karena luas lautan Indonesia jauh melampaui luas daratannya (Nikawanti, 2021).

Sebelum terpilih sebagai Presiden, Joko Widodo telah menginisiasi dan menerapkan rencana pembangunan baru untuk Indonesia, yang berakar dari konsep Poros Maritim Dunia. Konsep ini menekankan fokus Indonesia pada pengembangan sektor kelautan dalam berbagai aspek selama masa kepemimpinannya dari tahun 2015-2019. Pada Visi Poros Maritim yang telah diusung oleh Joko Widodo bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, mampu menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sumber

daya secara berkelanjutan di wilayah perairan, termasuk sebagai pusat jalur pelayaran dunia. Joko Widodo menjadikan Poros Maritim sebagai suatu landasan kebijakan luar negeri dengan mengupayakan untuk melakukakn kerja sama maritim dengan berbagai negara-negara seperti melakukan kerjasama maritim dengan Amerika, Belanda, India, dan Tiongkok (KOMINFO, 2016) .

Presiden Joko Widodo juga menggarisbawahi gagasan "Poros Maritim" daan "Tol Laut". Pemilihan untuk memprioritaskan pembangunan sektor maritim ini sangat masuk akal ketika dilihat dari perspektif sejarah bangsa. Bangsa Indonesia memiliki warisan sebagai bangsa pelaut atau bahari yang pernah meraih kejayaan di lautan sebelum masa kolonialisme, terutama melalui perdagangan antarpulau (KOMINFO, 2016)

Namun ,dengan Adanya Penerapan terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia oleh Pemerintahan Joko Widodo justru telah menimbulkan respons yang reaktif dari negara-negara di dalam dan di luar kawasan Asia Tenggara. Dimana Beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara besar di luar wilayah tersebut telah menunjukkan sikap yang kurang mendukung atau bahkan telah menentang langkah yang diambil oleh Pemerintahan Joko Widodo. Sikap ini memiliki potensi yang juga dapat mempengaruhi keseimbangan dan juga stabilitas keamanan yang sebelumnya relatif kondusif di kawasan tersebut yang akan mengakibatkan pengancam (Partogi et al., n.d.)

Presiden Joko Widodo menguraikan Gagasan Poros Maritim Dunia selama Indonesia Summit di Beijing dan di Pelabuhan Nanjing, menekankan peningkatan sektor kelautan sebagai fokus utama Indonesia di abad ke-21. Pada KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar, pada 8-12 November 2014, Presiden Widodo menyampaikan 5 poin kunci Poros Maritim Dunia. Pertama, terkait budaya maritim, dengan usaha untuk membangun kembali identitas nasional Indonesia sebagai negara maritim. Kedua, terkait ekonomi maritim, melibatkan pengelolaan dan pelestarian sumber daya maritim. Ketiga, terkait konektivitas maritim, fokus pada pembangunan infrastruktur, sarana perhubungan, dan pariwisata laut. Keempat, terkait ketahanan maritim, melibatkan optimalisasi soft power untuk menghadapi ancaman regional dan meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral. Kelima, terkait diplomasi maritim, dengan persiapan hard power untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Poros Maritim Dunia bertujuan menjadikan Indonesia kekuatan maritim yang besar, kuat, dan sejahtera, mengembalikan identitas maritim, menjaga keamanan di laut, memanfaatkan potensi maritim, mendorong kesetaraan ekonomi melalui jalur laut, dan

menjalankan diplomasi maritim sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia (Partogi et al., n.d.).

Posisi penting Indonesia di poros maritim dunia dalam perdagangan internasional membawa potensi besar dari sumber daya ekonomi laut yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk masa depan negara, serta menjadi dasar pembangunan nasional. Meski demikian, perlu meningkatkan pemanfaatan optimal potensi sumber daya laut. Oleh karena itu, diharapkan seluruh anggota kabinet Kabinet Kerja Jokowi mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Joko Widodo dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim tidak hanya fokus pada pengelolaan laut, tetapi juga bertujuan membuat perairan Indonesia menjadi yang paling aman di dunia untuk semua kegiatan laut. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin keamanan dan keselamatan transportasi laut yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha (Muhamad, 2009).

Dalam pidato pembukaan Our Ocean Conference ke-5 di Nusa Dua, Bali pada 29 Oktober 2018, Presiden Joko Widodo menyoroti peran signifikan Indonesia dalam konteks maritim global. Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan luas wilayah laut yang besar, memberikan kehidupan bagi jutaan manusia di seluruh dunia. Sebanyak 90% dari perdagangan dunia dan sekitar 61% dari pasokan minyak global dilakukan melalui jalur laut. Presiden juga mengungkapkan bahwa potensi nilai kekayaan laut Indonesia mencapai US\$ 24 triliun (Fauzi Aldino et al., n.d.).

Perubahan masa pemerintahan memiliki dampak pada evolusi kebijakan maritim Indonesia, mulai dari era Soekarno yang mencapai pengakuan internasional tentang status kepulauan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, hingga masa pemerintahan Joko Widodo yang menetapkan kebijakan Poros Maritim Dunia. Dalam upaya merealisasikan visi Poros Maritim Dunia, dilakukan berbagai langkah untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara lain melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral (Amalia, 2018).

## **METODE**

Penelitian ini menjelaskan metodologi penelitian yang dipilih. Pengarang menjelaskan alasan di balik metodologi yang dipilih dengan menunjukkan kepada pembaca bahwa metodologi tersebut dapat membantu pengarang mendapatkan hasil penelitian yang valid. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dikenal sebagai penelitian kualitatif naturalistik. pada Teknik yang dilakukan untuk mendapatkan segala bentuk informasi dengan menggunakan pengumpulan data secara dokumentasi, sumber media internet. pada sumber data yang berasal sumber data sekunder yang dimana

data tersebut merupakan yang fakta dan sudah pernah digunakan sumbernya secara luas yang telah tersebut di internet.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerjasama Maritim Indonesia-Tiongkok**

Tiongkok dan juga Indonesia, sangat mengandalkan perdagangan maritim, di mana sekitar 85% dari total perdagangan dilakukan melalui transportasi laut. Oleh karena itu, menjaga kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik menjadi sangat penting bagi Tiongkok guna melindungi kepentingan perdagangan internasionalnya yang terkait dengan jalur laut, termasuk dengan Indonesia. Kolaborasi antara kedua negara ini diperkuat oleh potensi keduanya dalam mengembangkan sektor kelautan. Sementara Indonesia memiliki visi Poros Maritim Dunia, Tiongkok mendukung proyek Jalur Sutra yang dicanangkan oleh Presiden Xi Jinping. Kerja sama maritim antara Indonesia dan Tiongkok diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pertahanan dan keamanan laut melalui Komite Kerja Sama Maritim (KKM). Kerjasama maritim antara kedua negara melibatkan beberapa aspek yang pertama adalah terkait dengan Keamanan Maritim, pada aspek ini Indonesia dan Tiongkok melakukan Kolaborasi militer yang melibatkan Angkatan Udara, Darat, dan Laut dari TNI, serta transfer teknologi. Namun, Indonesia menghadapi kendala dalam memperkuat kekuatan maritim karena terbatasnya dana, sumber daya manusia, teknologi, dan transportasi. yang kedua Diplomasi Maritim, dengan melakukan Negosiasi antara kedua negara yang menghasilkan nota kesepahaman dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, isu regional, dan kerjasama bilateral yang mendukung ide Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad (Amalia, 2018).

Tujuannya adalah meningkatkan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur. kedua terkait dengan Industri Galangan Kapal, dimana pada aspek ini dilakukannya Kolaborasi antara Kementerian Perindustrian Indonesia dan China Ship Building Corporation untuk memajukan industri galangan kapal di Indonesia melalui transfer teknologi dan kerjasama dengan perusahaan galangan kapal Indonesia. dan lalu yang ke empat melakukan Kerjasama Sosial Budaya Maritim antara Indonesia dengan Tiongkok, dimana pada Potensi kerjasama di bidang pariwisata antara Indonesia dan Tiongkok untuk meningkatkan jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Indonesia. Indonesia menargetkan 2 juta wisatawan Tiongkok pada periode 2015-2019, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara dari sektor pariwisata, mencapai 190 triliun rupiah pada tahun 2017 (Amalia, 2018)

### **Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Jepang**

Pada tanggal 13 Desember 2017, dilaksanakan Dialog Strategis pertama antara Indonesia dan Jepang dalam Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) untuk periode 2015-2020. Pembentukan IJMF dilakukan sebagai inisiatif dari pemerintah Indonesia-Jepang dengan tujuan meningkatkan dan menjaga keamanan maritim berdasarkan aturan yang sesuai dengan hukum internasional. Melalui Indonesia-Japan Maritime Forum, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan kerjasama dalam berbagai aspek maritim, termasuk keamanan dan keselamatan maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta pelatihan kejuruan maritim. Informasi ini disampaikan melalui Siaran Pers Bersama yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Qudsiati, 2021)

Pada pertemuan The 2nd Joint Committee Japan-Indonesia Maritime Forum, pemerintah Indonesia dan Jepang menyadari perlunya meningkatkan kerjasama keamanan maritim, terutama mengingat isu konflik di Laut China Selatan yang memiliki potensi mengakibatkan ketidakstabilan keamanan regional, terutama dengan perilaku semakin agresif dari pihak China. Kedua negara menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang tidak hanya sebagai mitra strategis, tetapi keduanya juga memiliki peran yang sangat signifikan di Kawasan (Aziz Kurmala, 2018)

### **Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat**

Pada 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama di Bidang Maritim, yang dikenal sebagai "Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation." Dalam kerangka Kerjasama Maritim, Amerika Serikat berkomitmen memberikan dukungan yang substansial untuk mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan peningkatan pengaturan sumber daya laut di berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia. Dalam upaya penanggulangan (I IU FISHING) AS dan Indonesia bekerjasama untuk melawan dan mencegah pencurian ikan, baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah ASEAN secara lebih luas. Berbagai lembaga seperti Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), Departemen Kehakiman, dan Departemen Pertahanan AS turut membantu Indonesia dengan teknologi, integrasi sistem, dan pengembangan kapasitas. Kolaborasi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Bidang Kelautan dilakukan melalui perjanjian antara AS dan Indonesia. NOAA bekerja sama dengan mitra di Indonesia untuk melakukan penelitian dan observasi terkait ekosistem laut, termasuk penelitian di bidang oseanografi dan perubahan iklim. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang

kompleksitas interaksi antara laut dan atmosfer, serta meningkatkan kemampuan memprediksi respon terhadap perubahan iklim dan ekosistem dalam jangka Panjang (U.S Embassy, 2015)

Peningkatan Keamanan Laut dan Pelabuhan: U.S. Coast Guard dan Program Export Control and Related Border Security Program Departemen Luar Negeri AS memberikan pelatihan kepada petugas penjaga pantai di Indonesia. Program Keamanan Pelabuhan Internasional dari US Coast Guard juga memperkuat kapasitas guna memenuhi standar Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut antara Amerika Serikat dan Indonesia. Promosi Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan: AS dan Indonesia berupaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di sektor maritim. AS juga mencari kemitraan pemerintah-swasta, pertemuan delegasi bisnis, serta memanfaatkan pameran dagang untuk mendukung pembangunan sektor perikanan dan pelabuhan yang berkelanjutan di Indonesia (AFANDI, 2019)

### **Kerjasama Maritim Indonesia-India**

Sebagai dua negara yang sangat terkait dengan wilayah maritim, para Menteri Luar Negeri membicarakan kerja sama dalam hal ini. Keduanya setuju untuk mengadakan Pertemuan Joint Task Force antara Indonesia dan India untuk melanjutkan pengembangan konektivitas serta kerja sama antara Aceh dan Ancaman-Nicobar. Selain itu, komitmen kuat juga diberikan untuk mempercepat penyelesaian batas maritim di Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Dalam bidang kerjasama pertahanan dan keamanan, Indonesia dan India memutuskan untuk terus mengeksplorasi kolaborasi melalui produksi bersama dalam industri pertahanan. Contoh yang sudah ada adalah kemitraan antara PT Pindad dan Tata Motors sebelumnya. Kedua Menteri Luar Negeri juga berharap agar Dialog Keamanan RI-India ke-2 dapat segera diselenggarakan untuk membahas berbagai aspek kerjasama keamanan kedua negara (KEMENLU, 2019)

### **Kerjasama Maritim Indonesia-Belanda**

Indonesia dan Belanda memiliki hubungan bilateral yang sangat baik meskipun Belanda merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia, Hubungan yang sangat erat oleh Indonesia dengan Belanda juga bisa dilihat melalui neraca perdagangan kedua negara, kunjungan delegasi, jumlah keberadaan warga negara satu di negara satunya, dalam bidang sosial dan budaya (Santosa, 2016)

Indonesia-Belanda perkuat kerja sama di bidang maritim Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

(Kemenko Marves), memperkuat kerja sama di bidang maritim dengan Belanda lewat 5th Bilateral Maritime Forum (BMF) RI-Belanda. Tiga isu itu yakni Pembangunan Pelabuhan Berkelanjutan dan Energi Maritim Terbarukan (*Sustainable Port Development and Renewable Maritime Energy*), Pembangunan Kapal Berkelanjutan (*Sustainable Shipbuilding*) dan Edukasi Maritim (*Maritime Education*) (Marves, 2023)

### **Analisis Perspektif Liberalisme**

Dalam pandangan liberalisme terhadap hubungan antarnegara, dianggap bahwa negara-negara terbentuk dari individu-individu yang memiliki kepentingan bersama. Hal ini diyakini sebagai jalan menuju pencapaian kebahagiaan. Perspektif liberalisme meyakini bahwa kerjasama lebih mungkin terjadi daripada konflik dalam hubungan internasional. Dengan demikian, kerjasama di antara negara-negara dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama dan mempromosikan kesejahteraan (Steans & Pettiford Lloyd, 2006).

Kaum liberalis sangat menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan semua aktor dalam hubungan internasional untuk mencapai keuntungan bersama. Oleh karena itu, upaya mencapai kepentingan yang saling menguntungkan antar aktor dapat menciptakan kondisi saling ketergantungan. Hal ini mendorong aktor-aktor tersebut untuk melakukan kerjasama guna mencapai tujuan bersama mereka. Dalam perspektif liberalisme, keyakinan ini menegaskan bahwa melalui kolaborasi dan saling bergantung, negara-negara dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka beroperasi secara terisolasi (Mansbach.W Richard, 2000)

Pendapat Jackson dan Sorensen mendukung teori liberalisme dengan menyebutkan tiga asumsi dasar. Pertama, liberalisme memiliki pandangan positif terhadap sifat manusia. Pandangan optimis ini mendorong aktivitas dalam hubungan internasional untuk cenderung bersifat kooperatif daripada konfliktual. Dengan menganut prinsip kerjasama, teori liberalisme meyakini bahwa hal ini akan membawa dampak positif dan kemajuan dalam berbagai bidang bagi para aktornya. Dengan kata lain, kerjasama dianggap sebagai kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkembang dalam konteks hubungan internasional menurut perspektif liberal (Dugis, 2016)

Liberalisme tidak hanya memusatkan perhatian pada satu aktor, yaitu negara atau state actor, dalam menjalankan hubungan internasional. Dalam perspektif liberalisme, non-state actor juga dianggap memiliki peran yang signifikan bahkan lebih besar dibanding state actor. Liberalisme sangat menekankan nilai kebebasan dan kemajuan individu, yang kemudian membentuk kelompok atau organisasi untuk saling memberikan kebahagiaan. Dari interaksi di

antara kelompok-kelompok tersebut, setiap individu dapat mencapai kebahagiaan dengan menyatukan kepentingan-kepentingan bersama. Dalam kerangka pandangan liberalisme, hubungan antar negara dianggap dapat dilakukan dengan cara ini karena negara sendiri terbentuk dari individu-individu yang memiliki kepentingan bersama. Sebagaimana liberalisme meyakini, kerjasama antarnegara dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual, membawa dampak positif pada pencapaian kebahagiaan dan kemajuan Bersama (Dugis, 2016)

Dalam kerangka liberalisme, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tersebut didorong oleh upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan bebas, investasi, dan pertukaran teknologi. Prinsip-prinsip liberalisme juga mendorong pembentukan institusi internasional seperti forum kerjasama maritim dan perjanjian perdagangan untuk mengelola hubungan antarnegara secara damai. Adanya interdependensi ekonomi di sektor maritim dan kelautan menjadikan kerja sama multilateral sebagai strategi efektif dalam mengatasi tantangan bersama, termasuk isu keamanan laut dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi wilayah perairan Indonesia. Dengan demikian, pendekatan liberalisme memberikan landasan yang kuat untuk memahami dinamika kerja sama Indonesia dalam konteks ekonomi, politik, dan maritim dengan negara-negara mitra.

### ***Problem Malignancy***

Menurut Underdal, dalam pengertian suatu masalah, terdapat dua jenis masalah. Pertama, jenis masalah benign atau yang juga disebut tipe masalah ringan, yang menurutnya adalah masalah yang mudah ditemukan solusinya dan memiliki dampak positif terhadap penilaian tingkat kolaborasi negara anggota. Dalam kategori masalah benign, terdapat tiga indikator, yaitu *problem of coordination*, *symmetry*, dan *cross-cutting cleavages*. Kedua, terdapat jenis masalah malign atau tipe masalah berat, yang menurut Underdal adalah masalah yang sulit ditemukan solusinya dan memiliki dampak negatif terhadap penilaian tingkat kolaborasi negara anggota. Dalam kategori masalah malign, terdapat tiga indikator, yaitu *incongruity*, *asymmetry*, dan *cumulative cleavages*. Arild Underdal (Edward L.Miles et al., 2001).

Dengan merujuk pada penjelasan di atas, terkait Illegal Fishing yang dialami oleh kelautan Indonesia, dimana pada upaya yang dilakukan Jokowi mengambil inisiatif dengan menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tindakan tersebut mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, intensifikasi patroli di perairan, dan pemberian sanksi terhadap kapal-kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal. Sementara itu, terkait Kurangnya Infrastruktur, Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur maritim sebagai prioritas utama.

Upaya ini mencakup pengembangan pelabuhan, pembangunan jalan di wilayah pesisir, dan peningkatan konektivitas antar pulau sebagai langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan tersebut.

### ***Problem Solving Capacity***

Menurut Underdal, Kapasitas Pemecahan Masalah (*Problem Solving Capacity*) mengacu pada kemampuan suatu rezim dalam menyelesaikan masalah. Jika kapasitasnya tinggi, rezim tersebut akan lebih efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Sebaliknya, kapasitas yang rendah akan membuat rezim tidak efektif dalam menyelesaikan masalah. Terdapat tiga indikator dalam kapasitas pemecahan masalah, yakni pengaturan institusional yang melibatkan aturan-aturan dalam praktik sosial dan interaksi antar anggota untuk memberikan panduan dan peran, distribusi kekuasaan yang mengontrol rezim, dan keterampilan dan energi instrumental yang bersifat lebih informal dan dapat dialokasikan dalam rezim untuk meningkatkan efektivitasnya (Edward L.Miles et al., 2001)

Pada upaya untuk menyelesaikan masalah yang di alami indonesia,Jokowi juga melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah dengan yang pertama yaitu melakukan Pengembangan Infrastruktur Maritim, dimana pada upaya ini Sejumlah proyek besar telah diinisiasi, termasuk Program Tol Laut dan proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, guna meningkatkan konektivitas serta infrastruktur maritim secara keseluruhan. lalu juga terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Jokowi juga memperkuat upaya dalam program pengelolaan sumber daya kelautan yang lebih berkelanjutan. Hal ini melibatkan langkah-langkah peningkatan produktivitas sektor perikanan, memberdayakan nelayan, dan mendorong inisiatif konservasi lingkungan laut.

### **Level Collaborative**

Kolaborasi adalah istilah umum yang kerap digunakan untuk menggambarkan pola kerja sama antara lebih dari satu pihak. Terdapat berbagai pengertian mengenai kolaborasi yang diajukan oleh berbagai ahli dengan perspektif yang beragam. Perbedaan pengertian tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip dasar, seperti kebersamaan, kerja sama, pembagian tugas, kesetaraan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Walaupun demikian, merumuskan definisi menyeluruh dan komprehensif mengenai konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum, kolaborasi dapat diartikan sebagai hubungan saling partisipasi antar organisasi yang sepakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan pertukaran informasi, sumber daya, manfaat, serta tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi berbagai masalah (London, 2016).

Scott London mengartikan kolaborasi sebagai bentuk kerja sama yang tidak memiliki batasan waktu atau periode tertentu. Selama masih ada urusan atau masalah yang berkaitan atau bersinggungan dengan pihak lain, kolaborasi tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, hingga organisasi. Dalam pelaksanaan kolaborasi, pemahaman terhadap kinerja lembaga publik menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, studi mengenai kolaborasi lebih banyak difokuskan pada tingkat organisasi, khususnya dalam konteks organisasi sektor public (London, 2016).

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk meningkatkan kecepatan pencapaian tujuan secara kolektif. Dalam proses pencapaian tujuan tersebut, tidak disarankan untuk melakukan pemisahan tugas yang ketat. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Nawawi bahwa kolaborasi merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama dengan membagi tugas atau pekerjaan, bukan untuk melakukan pemisahan pekerjaan. Kolaborasi dipandang sebagai suatu kesatuan kerja, di mana semua elemen terarah pada pencapaian tujuan Bersama (London, 2016)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam kepemimpinan era Jokowi untuk menangani masalah di Indonesia, penyelesaian dilakukan melalui kerja sama regional dengan berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur. Upaya ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan mitra negara lainnya. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjalin kerjasama dengan mitra industri serta memperluas kerjasama dengan lembaga internasional seperti International Maritime Organization (IMO). Jokowi juga aktif bekerjasama dengan masyarakat dan organisasi non-pemerintah. Keterlibatan mereka dianggap sangat penting untuk mendukung dan berkontribusi pada kemajuan negara. Semua langkah ini menggambarkan pendekatan holistik Jokowi dalam mencari solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Indonesia. Tentunya, kerjasama lintas sektor dan tingkatan ini mencerminkan strategi kepemimpinan yang inklusif dan berorientasi pada hasil yang optimal untuk kemajuan negara.

#### **Pandangan Ekonomi Politik Maritim CAPRES-CAWAPRES 2024**

Pandangan ekonomi politik maritim yang diusung oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilu 2024 dengan slogan "Indonesia Adil Makmur untuk Semua" menunjukkan komitmen mereka untuk membangun keberlanjutan ekonomi dan keamanan melalui pemanfaatan potensi maritim Indonesia. Dalam visinya, Anies-Muhaimin menekankan pentingnya kemandirian pangan dan ketahanan energi. Peningkatan produksi pangan lokal dan diversifikasi sumber energi dapat mengurangi ketergantungan pada impor, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi

risiko fluktuasi harga dunia. Fokus pada kedaulatan air mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sumber daya laut. Langkah-langkah untuk melindungi perairan Indonesia, termasuk penegakan hukum maritim dan perlindungan ekosistem laut, dapat meningkatkan potensi ekonomi kelautan sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Menciptakan lapangan kerja adalah strategi penting untuk mengentaskan kemiskinan. Fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan pembangunan kawasan yang berbasis manusia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sihombing, 2024)

Dukungan terhadap korporasi Indonesia untuk berkembang di dalam negeri dan di pasar global menunjukkan upaya untuk memperkuat sektor bisnis nasional. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. Pencapaian keadilan ekologis berkelanjutan mencerminkan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Dengan memperhatikan dampak ekologis dalam pembangunan ekonomi, pasangan Anies-Muhaimin berusaha memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan lingkungan. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara merupakan aspek krusial untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Dengan meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di kancah politik global, mereka berupaya memastikan kepentingan nasional terjaga dengan baik. Fokus pada pemulihan kualitas demokrasi dan penegakan hukum menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik. Upaya memberantas korupsi dan menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat menciptakan fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Pandangan ekonomi politik maritim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mencerminkan usaha untuk menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan potensi maritim negara secara optimal.

Pandangan ekonomi politik maritim yang diusung oleh calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD pada Pemilu 2024 dengan slogan "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari" dengan menunjukkan komitmen mereka terhadap pemanfaatan potensi laut sebagai sumber kekuatan ekonomi, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan. Beberapa argumen terkait pandangan ekonomi politik maritim yang telah diusung adalah Pernyataan bahwa laut bukanlah pemisah melainkan pemersatu mencerminkan pemahaman akan posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim. Pemahaman ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi regional, dan memperkuat persatuan nasional. Kemudian terkait laut dapat menjadi kekuatan ekonomi, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan

menunjukkan kesadaran akan potensi sumber daya laut yang melimpah. Pemanfaatan laut secara berkelanjutan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing ekonomi, tetapi juga memperkuat peran Indonesia di dunia internasional. Kemudian memfokuskan menjaga dan merawat laut secara berkelanjutan sebagai upaya untuk mencapai kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan konsep pembangunan yang inklusif. Pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang merata kepada masyarakat (BBC NEWS, 2023).

Terdapat misi poin keenam yang mencakup ekonomi hijau dan biru, Ganjar-Mahfud menunjukkan keinginan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi pada prinsip keberlanjutan. Pemanfaatan energi hijau dan ekonomi biru dari sektor kelautan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sambil mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi untuk mempercepat perwujudan lingkungan hidup berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru menunjukkan keseriusan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Melibatkan sektor kelautan dalam strategi ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi positif terhadap keseimbangan ekosistem laut. Pandangan ekonomi politik maritim Ganjar-Mahfud menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan lingkungan, serta upaya untuk mencapai kedaulatan dan kemakmuran nasional. Dengan fokus pada ekonomi hijau dan biru, pasangan ini berusaha menciptakan landasan ekonomi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan Indonesia sebagai negara maritim.

Pandangan ekonomi politik maritim yang diusung oleh calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024 dengan slogan "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045" menekankan pentingnya memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Berikut adalah beberapa argumen terkait pandangan ekonomi politik maritim, Fokus pada swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru menunjukkan komitmen untuk menciptakan kemandirian nasional. Dengan meningkatkan produksi dan pengelolaan sumber daya secara mandiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat ketahanan ekonomi. Kemudian Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara menjadi prioritas kedua dalam misi ASTA CITA menunjukkan kesadaran akan pentingnya kestabilan dan kedaulatan negara. Upaya untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan

investasi. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, termasuk di sekitar sektor maritim, menunjukkan strategi untuk mengoptimalkan potensi laut sebagai sumber daya ekonomi. Dengan menggerakkan sektor ini, dapat diciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai tambah produk domestik. Memfokuskan pada hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam, terutama di sektor maritim, mencerminkan niat untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dengan meningkatkan nilai tambah produk dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, akan tercipta peluang pekerjaan yang signifikan (BBC NEWS, 2023)

Upaya untuk mewujudkan keadilan ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi menunjukkan perhatian terhadap pemerataan ekonomi. Dengan mengoptimalkan sumber daya alam, terutama di sektor maritim, diharapkan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Meningkatkan pendorongan kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau dan biru mencerminkan komitmen pada pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dan biru, Prabowo-Gibran berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, pandangan ekonomi politik maritim Prabowo-Gibran menunjukkan tekad untuk menciptakan Indonesia yang mandiri, kuat dalam pertahanan dan keamanan, serta maju dalam pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sektor maritim dapat menjadi salah satu aspek krusial dalam program calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Ini menjadi prioritas untuk meningkatkan pembangunan dan keberlanjutan sektor kelautan dan perairan di Indonesia. Dengan keterlibatan yang kuat dalam sektor yang dimiliki oleh Indonesia, negara ini dapat mengoptimalkan potensinya dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan peran strategisnya di tingkat global dan regional. Beberapa cawapres memiliki pandangan potensial terkait pengembangan ekonomi politik maritim masing-masing. Namun, disayangkan jika isu maritim tidak menjadi fokus kebijakan yang penting bagi cawapres, karena ekonomi politik maritim memiliki signifikansi bagi seorang calon presiden. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi maritim dengan wilayah yang luas di sektor kelautan, perikanan, perdagangan maritim, pariwisata laut, dan industri maritim. Ini menjadi sangat penting bagi seorang cawapres untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Dengan menjaga keamanan maritim, termasuk melindungi sumber daya alam, melawan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan ilegal, dan mengamankan jalur perdagangan laut, merupakan aspek krusial. Seorang cawapres harus memiliki strategi keamanan maritim yang

efektif untuk melindungi kelautan Indonesia. lalu terkait dengan hubungan diplomatik, kerjasama dan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang berbagi perairan maritim perlu diperhatikan. Indonesia harus mampu menjalin kerjasama dan kemitraan untuk mengelola serta meningkatkan ekonomi politik maritim di Indonesia (Ismadi, 2021).

## KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dan fokus pada pengembangan sektor kemaritiman adalah bahwa pembangunan maritim memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek, baik dari segi ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, hukum, dan keamanan. Dalam era pemerintahan Joko Widodo, terutama melalui konsep Poros Maritim Dunia, pemerintah Indonesia berusaha mengoptimalkan potensi maritimnya dan membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas serta pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Upaya ini melibatkan kerja sama dengan berbagai negara, seperti Amerika, Belanda, India, dan Tiongkok, untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan sektor kelautan.

Penerapan kebijakan Poros Maritim Dunia tidak selalu mendapat respons positif dari semua pihak. Beberapa negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara besar di luar wilayah tersebut mungkin memiliki pandangan yang berbeda terhadap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Joko Widodo. Hal ini menciptakan dinamika diplomasi dan keamanan yang perlu dikelola dengan hati-hati. Dalam hal kerja sama maritim dengan negara-negara tertentu, seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan India, Indonesia mencari keseimbangan antara kepentingan nasionalnya dan kerjasama regional. Dalam konteks ini, kerjasama bukan hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga keamanan maritim, diplomasi, dan kerjasama sosial-budaya. Dengan menggunakan teori liberalisme, kerjasama internasional dan perdagangan bebas dianggap kunci menuju kebahagiaan dan kemajuan bersama. Teori ini menekankan sifat positif manusia, peran penting non-state actor, dan keyakinan bahwa kerjasama membawa dampak positif. Indonesia, dalam kerja sama ekonomi dengan negara mitra seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, mengadopsi prinsip liberalisme dengan fokus pada interdependensi dan kerjasama multilateral.

Dalam menangani masalah maritime, pemerintahan Jokowi mengambil langkah-langkah tegas seperti penegakan hukum yang ketat. Terkait masalah infrastruktur, fokus pada pembangunan pelabuhan dan jaringan transportasi laut mencerminkan kapasitas pemecahan masalah Indonesia. Konsep "Problem Malignancy" digunakan untuk membedakan masalah yang mudah diatasi (benign) dan masalah yang sulit (malign), membantu menganalisis langkah-langkah

pemerintah. Secara keseluruhan, pendekatan liberalisme memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menganalisis kerja sama ekonomi, politik, dan maritim Indonesia dengan negara mitra, serta upaya penyelesaian masalah terkait sektor maritim. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa kerja sama lintas sektor dan lintas tingkatan merupakan strategi yang efektif dalam menangani masalah kompleks, seperti illegal fishing, kurangnya infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Kolaborasi antar sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- AFANDI. (2019). *Kerja sama Keamanan Maritim Indonesia – Amerika Serikat Di Asia Pasifik Sebagai Bagian Strategi Poros Maritim Dunia Tahun 2015-2017*.  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16737/H.%20BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y>
- Amalia, R. (2018). KERJA SAMA MARITIM INDONESIA-TIONGKOK MENUJU VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(3), 1271–1280.
- Aziz Kurmala. (2018). *Indonesia-Jepang tingkatkan kerja sama maritim*. ANTARA NEWS.
- BBC NEWS. (2023, November 13). *Pemilu 2024: Tiga pasangan capres-cawapres akan bertarung dalam Pilpres, apa saja visi dan misi mereka?* BBC NEWS INDONESIA.
- Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional; Perspektif-Perspektif Klasik*.  
[www.csgsunair.org](http://www.csgsunair.org)
- Edward L.Miles, Andresen Steinar, Carlin.M Elaine, & Wettestad, J. (2001). *Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*. The MIT Press.
- Fauzi Aldino, F., Hubungan Internasional, J., & Ilmu Sosial Dan Politik, F. (n.d.). *PENGEMBANGAN WILAYAH MARITIM INDONESIA STUDI KASUS : KERJASAMA INDONESIA DENGAN CHINA Indonesian’s Maritime Development Case Study: Indonesia with China Cooperation*.
- Ismadi. (2021, August 9). *Sektor Maritim Memiliki Peranan Penting bagi Indonesia*. Nusantara Maritime News.
- KEMENLU. (2019, September 6). *Indonesia – India Dorong Kerja Sama Ekonomi dan Maritim*. KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.
- London, S. (2016). *Collaboration and Community*.  
<http://www.scottlondon.com/reports/collaboration.pdf>
- Mansbach.W Richard. (2000). *Global politics in a changing world a reader*. Houghton Mifflin.

- Marves. (2023, October 16). *Melalui Kemenko Marves, Indonesia - Belanda Perkuat Kerja Sama di Bidang Maritim*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi.
- KOMINFO. (2016, October). *Menuju Poros Maritim Dunia*.
- Muhamad, S. V. (2009). *5-Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA*. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)
- Nikawanti, G. (2021). Ecoliteracy : Membangun Ketahanan Pangan dari Kekayaan Maritim Indonesia. *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, 2(2), 149–166.  
<https://doi.org/10.17509/ijom.v2i2.37603>
- Partogi, P., Poros, K., Dunia, M., Widodo, J., & Nainggolan, P. P. (n.d.). *KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA JOKO WIDODO DAN IMPLIKASI INTERNASIONALNYA (Maritime Axis Policy and Its International Implications)*.
- Qudsiati, A. D. (2021). *Kerjasama Keamanan Maritim Antara Indonesia dan Jepang melalui IJMF periode 2015-2020*.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64908/1/AISYAH%20DWI%20QUDSIATI.pdf>
- Santosa, E. (2016). *71 Tahun Merdeka, Hubungan RI-Belanda Saat ini Menguat*.
- Sihombing, F. R. (2024, January 7). *Membandingkan Visi & Misi Pertahanan Anies-Prabowo-Ganjar Jelang Debat* Baca artikel detiknews, “Membandingkan Visi & Misi Pertahanan Anies-Prabowo-Ganjar Jelang Debat” selengkapnya <https://news.detik.com/pemilu/d-7128420/membandingkan-visi-misi-pertahanan-anies-prabowo-ganjar-jelang-debat>. Detik News.
- Steans, J., & Pettiford Lloyd. (2006). *Hubungan Internasional : perspektif dan tema (Cet.1)*. Pustaka Pelajar.
- U.S Embassy. (2015). *Kerjasama AS-Indonesia di Bidang Maritim*.